

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANWIL DJKN DKI JAKARTA
KPKNL JAKARTA II



LAPORAN KEUANGAN

TA 2022

(Audited)



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2023
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Ali Azcham Noveansyah

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iii
Ringkasan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	3
II. Neraca.....	4
III. Laporan Operasional.....	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	7
A. Penjelasan Umum.....	7
B. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	17
C. Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	20
D. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional.....	23
E. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	26
F. Pengungkapan Penting Lainnya.....	28
Lampiran	



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA I**

JALAN PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NO.10 JAKARTA PUSAT 10410
TELEPON: (021) 34835237; FAKSIMILE: (021) 34835131; SITUS: www.djkn.kemenkeu.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 (*audited*) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 (*audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2023
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Ali Azcham Noveansyah

Laporan Keuangan KPKNL Jakarta II TA 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2022 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp18.875.243.248 atau mencapai 94 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp20.144.908.000.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.692.295.649 atau mencapai 90 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp1.880.284.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.365.188.363 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.089.617.705; Aset Tetap (netto) sebesar Rp275.570.658; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.089.375.646 dan Rp275.812.717.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan operasional, beban operasional, surplus/ defisit dari kegiatan operasional, surplus/ defisit dari kegiatan non operasional, surplus/ defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/ defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp18.838.755.647, sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp1.848.510.588 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp16.990.245.059. Kegiatan Non Operasional surplus sebesar Rp3.476.395 dan Pos-Pos Luar Biasa sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp16.993.721.454.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp298.067.237 ditambah Surplus-LO sebesar Rp16.993.721.454, dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar (Rp17.015.975.974) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp275.812.717.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) TA 2022 menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK TA 2022 adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk TA 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA II 604442

Tgl Data : 08/05/23 12:00 PM
Tgl Cetak : 08/05/23 2:15 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_komparatif

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	20,144,908,000	18,875,243,248	(1,269,664,752)	94	14,095,327,000	19,901,579,192	(5,806,252,192)	141
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	20,144,908,000	18,875,243,248	(1,269,664,752)	94	14,095,327,000	19,901,579,192	(5,806,252,192)	141
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BARANG	1,880,284,000	1,692,295,649	187,988,351	90	1,895,236,000	1,844,502,330	50,733,670	97
	BELANJA MODAL	0	0	0	0	46,548,000	46,546,500	1,500	100
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA II 604442

Tgl Data : 08/05/23 12:00 PM
Tgl Cetak : 08/05/23 2:15 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_komparatif

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	1,880,284,000	1,692,295,649	187,988,351	90	1,941,784,000	1,891,048,830	50,735,170	90
C	PEMBIAYAAN				0				0

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

DKI JAKARTA, 8 Mei 2023
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ALI AZCHAM NOVEANSYAH
196511061991031001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

**SATUAN KERJA : (604442) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JAKARTA II**

Tgl Data : 08/05/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 08/05/23 2:16 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Penerimaan	0	1,350,000	(1,350,000)	(100.00)
Kas Lainnya dan Setara Kas	1,089,137,105	6,497,354,986	(5,408,217,881)	(83.24)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	47,998,722	(47,998,722)	(100.00)
Persediaan	480,600	0	480,600	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	1,089,617,705	6,546,703,708	(5,457,086,003)	(83.36)
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	2,672,770,477	2,398,073,477	274,697,000	11.45
Aset Tetap Lainnya	3,263,752	3,263,752	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,400,463,571)	(2,136,281,198)	(264,182,373)	12.37
JUMLAH ASET TETAP	275,570,658	265,056,031	10,514,627	3.97
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	395,156,500	1,346,159,146	(951,002,646)	(70.65)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(395,156,500)	(1,331,635,541)	936,479,041	(70.33)
JUMLAH ASET LAINNYA	0	14,523,605	(14,523,605)	(100.00)
JUMLAH ASET	1,365,188,363	6,826,283,344	(5,461,094,981)	(80.00)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,089,375,646	6,497,354,986	(5,407,979,340)	(83.23)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	0	30,861,121	(30,861,121)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,089,375,646	6,528,216,107	(5,438,840,461)	(83.31)
JUMLAH KEWAJIBAN	1,089,375,646	6,528,216,107	(5,438,840,461)	(83.31)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	275,812,717	298,067,237	(22,254,520)	(7.47)
JUMLAH EKUITAS	275,812,717	298,067,237	(22,254,520)	(7.47)
JUMLAH EKUITAS	275,812,717	298,067,237	(22,254,520)	(7.47)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,365,188,363	6,826,283,344	(5,461,094,981)	(80.00)

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

DKI JAKARTA, 8 Mei 2023
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ALI AZCHAM NOVEANSYAH
196511061991031001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

**SATUAN KERJA : (604442) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JAKARTA II**

Tgl Data : 08/05/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 08/05/23 2:15 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	18,838,755,647	19,761,782,336	(923,026,689)	(4.671)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	18,838,755,647	19,761,782,336	(923,026,689)	(4.671)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	18,838,755,647	19,761,782,336	(923,026,689)	(4.671)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	195,414,315	118,835,500	76,578,815	64.441
Beban Barang dan Jasa	952,416,523	1,078,311,674	(125,895,151)	(11.675)
Beban Pemeliharaan	176,547,000	179,730,300	(3,183,300)	(1.771)
Beban Perjalanan Dinas	368,476,752	467,624,856	(99,148,104)	(21.202)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

**SATUAN KERJA : (604442) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JAKARTA II**

Tgl Data : 08/05/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 08/05/23 2:15 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	155,655,998	179,902,491	(24,246,493)	(13.478)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	1,848,510,588	2,024,404,821	(175,894,233)	(8.689)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	16,990,245,059	17,737,377,515	(747,132,456)	(4.212)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	3,476,395	(982,178)	4,458,573	(453.948)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	18,000,000	0	18,000,000	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	14,523,605	982,178	13,541,427	1,378.714
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	1,950,000	(1,950,000)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	1,950,000	(1,950,000)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	3,476,395	967,822	2,508,573	259.198
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	16,993,721,454	17,738,345,337	(744,623,883)	(4.198)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	16,993,721,454	17,738,345,337	(744,623,883)	(4.198)

ALI AZCHAM NOVEANSYAH
196511061991031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (604442) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JAKARTA II

Tgl Data : 08/05/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 08/05/23 2:15 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	298,067,237	575,981,112	(277,913,875)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	16,993,721,454	17,738,345,337	(744,623,883)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	(5,728,850)	5,728,850	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	(5,728,850)	5,728,850	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(17,015,975,974)	(18,010,530,362)	994,554,388	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(22,254,520)	(277,913,875)	255,659,355	-
EKUITAS AKHIR	275,812,717	298,067,237	(22,254,520)	-

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

DKI JAKARTA, 8 Mei 2023

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ALI AZCHAM NOVEANSYAH

196511061991031001

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis KPKNL Jakarta II

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II merupakan salah satu unit vertikal DJKN yang berada di bawah Kanwil DJKN DKI Jakarta, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Melalui peran tersebut diharapkan dapat memfasilitasi tercapainya tertib administrasi, tertib hukum, tertib fisik dalam pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II berkomitmen dengan visi DJKN ***“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah.
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/ penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I adalah sebagai berikut:

Pendapatan-
LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-
LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Keuangan adalah berdasarkan SE-17/MK.1/2015 (15 Jenis Penerimaan), sebagai berikut:

- 1) Penerimaan Bea Lelang Penjual dan Pembeli atas lelang non

eksekusi oleh Pejabat Lelang Kelas II (setoran SSBP menggunakan MAP 423292);

- 2) Penerimaan atas Kertas Sekuriti Untuk Pembuatan Kutipan Risalah Lelang bagi Pejabat Lelang Kelas II (setoran SSBP menggunakan MAP 423292);
- 3) Penerimaan Bea Lelang Penjual dan Pembeli atas Lelang Pegadaian (setoran SSBP menggunakan MAP 423293);
- 4) Penerimaan atas Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II (setoran SSBP menggunakan MAP 423999);
- 5) Penerimaan Pemberian Izin Operasional Balai Lelang (setoran SSBP menggunakan MAP 423999);
- 6) Penerimaan atas Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Lelang Kelas II (setoran SSBP menggunakan MAP 423999);
- 7) Penerimaan Denda Keterlambatan Penyetoran Bea Lelang Ke Kas Negara oleh Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II (setoran SSBP menggunakan MAP 423292);
- 8) Penerimaan Bea Lelang Batal Atas Permintaan Penjual (setoran SSBP menggunakan MAP 423227);
- 9) Penerimaan Bea Lelang Penjual dan Pembeli (setoran SSBP menggunakan MAP 423227) atas lelang eksekusi, non eksekusi oleh Pejabat Lelang Kelas I, dan lelang kayu hasil hutan lainnya dari tangan pertama;
- 10) Penerimaan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dari Penanggung Hutang (setoran SSBP menggunakan MAP 423228);
- 11) Penerimaan Uang Jaminan Penawaran Lelang dari Pembeli Wanprestasi (setoran SSBP menggunakan MAP 423291);
- 12) Penerimaan atas Uang Jaminan Penawaran Lelang Yang Tidak Diambil (setoran SSBP menggunakan MAP 423291);
- 13) Penerimaan Kelebihan Hasil Bersih Lelang PUPN yang Tidak Diambil oleh Penanggung Hutang dan/ atau Penjamin Hutang (setoran SSBP menggunakan MAP 423998);
- 14) Penerimaan Pemohon Lelang Tidak Bersedia Mengambil/ Mencairkan Cek/BG Menerima Hasil Bersih Lelang (setoran SSBP menggunakan MAP 423998);
- 15) Penyetoran atas Penerimaan Piutang Negara Yang Tidak Jelas (setoran SSBP menggunakan MAP 423999)

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs

tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya,

dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. iSecara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20

Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	Tahun Anggaran 2022	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	20.144.908.000	18.875.243.248
Pendapatan Lain-lain	0	0
Jumlah Estimasi Pendapatan	20.144.908.000	18.875.243.248
Belanja		
Belanja Pegawai		
Belanja Barang	1.880.284.000	1.692.295.649
Belanja Modal		
Belanja Bantuan Sosial		
Jumlah Anggaran Belanja	1.880.284.000	1.692.295.694

Realisasi

Pendapatan

Rp18.875.243.248

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp18.875.243.248,00 atau mencapai 94 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp20.144.908.000,00. Pendapatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II terdiri dari Pendapatan Jasa II (Pendapatan Bea Lelang dan Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara) dan Pendapatan Jasa Lainnya (Pendapatan Jasa Lainnya dan Pendapatan Bea Lelang Pegadaian). Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Uraian	2022			
	Anggaran	Realisasi	Realisasi Atas (Bawah) Anggaran	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	20.144.908.000	18.875.243.248	(1.269.664.752)	94

Realisasi Belanja
Negara
Rp1.692.295.694

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2022 adalah sebesar Rp1.692.295.694,00 atau 90% dari anggaran belanja sebesar Rp1.880.284.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2022

Uraian	2022		Realisasi Atas (Bawah) Anggaran	%
	Anggaran	Realisasi		
Belanja				
Belanja Pegawai				
Belanja Barang	1.880.284.000	1.692.295.649	187.988.351	90
Belanja Modal				
Belanja Bantuan Sosial				
Jumlah Anggaran Belanja	1.880.284.000	1.692.295.694	187.988.351	90

Belanja Pegawai
Rp0,-

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 sebesar Rp0. Realisasi belanja TA 2022 terhadap anggaran sebesar 0 persen. Pembayaran terkait belanja pegawai dilaksanakan secara terpusat sejak bulan April 2021.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022

URAIAN	ANGGARAN BELANJA TA 2022	REALISASI BELANJA TA 2022	REALISASI ANGGARAN %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0.00	0.00	-
PNS	0.00	0.00	
Belanja Honorarium	0.00	0.00	
Belanja Lembur	0.00	0.00	-
Belanja Vakasi	0.00	0.00	
Jumlah Belanja Bruto	0.00	0.00	-
Pengembalian Belanja Pegawai	0.00	0.00	
Jumlah Belanja Netto	0.00	0.00	-

B.2.2 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp1.692.295.649

Realisasi Belanja Barang TA 2022 sebesar Rp1.692.295.649,00. Realisasi Belanja Barang TA 2022 terhadap anggaran sebesar 90,00 persen. Hal ini disebabkan antara lain karena kurang maksimalnya penyerapan anggaran TA

2022 yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 sejak bulan Maret 2019 hingga akhir tahun 2022.

Dalam belanja barang ini terdapat belanja terkait penanganan pandemic COVID-19 berupa Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp47.169.373 yang digunakan untuk keperluan membeli masker, hand sanitizer, disinfektan, serta obat-obatan dan penambah daya tahan tubuh dan berlangganan layanan *meeting online*.

Belanja Modal
Rp0

B.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2022 adalah sebesar Rp0,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal TA 2022

URAIAN	ANGGARAN BELANJA TA 2022	REALISASI BELANJA TA 2022	REALISASI ANGGARAN %
Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	-
Belanja Modal Lainnya	0.00	0.00	-
Jumlah Belanja Bruto	0.00	0.00	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja Netto	0.00	0.00	-

B.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 adalah sebesar Rp0,00 atau sebesar 0% dari anggaran belanja modal peralatan dan mesin.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022

URAIAN	ANGGARAN BELANJA TA 2022	REALISASI BELANJA TA 2022	REALISASI ANGGARAN %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	-
Jumlah Belanja Bruto	0.00	0.00	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja Netto	0.00	0.00	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.350.000. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (Dana Milik Pemerintah/DJKN yang belum disetorkan ke Kas Negara).

*Kas Lainnya dan Setara
Rp1.089.137.105,-*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.089.137.105,00 dan Rp6.497.354.986,00.

keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp0,00	Rp0,00
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	Rp1.089.137.105	Rp6.497.354.986,00
Jumlah	Rp1.089.137.105	Rp6.497.354.986,00

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp480.600 dan Rp0

Persediaan merupakan jenis asset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	TAHUNAN 2022	TAHUNAN 2021
Barang Konsumsi	480.000,00	-
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	480.000,00	-

C.5 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp2.672.770.477 dan Rp2.398.073.477

C.6 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp3.263.752 dan Rp3.263.752. Aset tetap lainnya tersebut berupa barang monografi. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk TA 2022. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp(2.400.463.571)*

C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing Rp(2.400.463.571) dan Rp(2.136.281.198). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

*Aset Lain-Lain
Rp213.041.865*

C.8 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 pada KPKNL Jakarta I adalah Rp213.041.865 dan Rp546.364.168. Aset Lain-lain merupakan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan.

*Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya Rp(0)*

C.9 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp0,00 dan Rp14.523.605. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

*Utang kepada Pihak
Ketiga Rp1.089.375.646*

C.10 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.089.375.646 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

*Ekuitas
Rp275.812.717*

C.11 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp275.812.717 dan Rp298.067.237,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNPB
Rp18.838.755.647

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp18.838.755.647 dan Rp19.761.782.336.

Pendapatan Jasa Lainnya merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari uang jaminan lelang yang telah disetor ke rekening Bendahara Penerima, namun pada waktu yang telah ditentukan pemenang lelang tidak melunasi sehingga dinyatakan wanprestasi.

Beban Pegawai
Rp0,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai pada TA 2022 mengalami penurunan yang sangat signifikan karena telah dilaksanakannya sentralisasi belanja pegawai sejak TA 2021, dimana pembayaran belanja pegawai dilaksanakan oleh Kantor Pusat DJKN.

Beban Persediaan
Rp480.600

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp480.600 dan Rp0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk TA 2022 dan TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2022 dan TA 2021

Beban Persediaan Konsumsi	480.600,00	0,00	#DIV/O!
Beban Persediaan Bahan Baku	0,00	0,00	
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	
Beban Persediaan Lainnya	-	-	
Jumlah Beban Persediaan	480.600,00	0,00	#DIV/O!

Beban Barang dan
Jasa
Rp952.416.523

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp952.416.523 dan Rp1.078.311.674. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Beban
Pemeliharaan
Rp176.547.000

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan TA 2022 dan TA 2021 masing-masing sebesar Rp176.547.000 dan Rp179.730.300. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk TA 2022 dan TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2022 dan TA 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	176.547.000	179.730.300	(1,77)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	0	
Jumlah	176.547.000	179.730.300	(1,77)

Beban Perjalanan
Dinas
Rp368.476.752

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas TA 2022 dan TA 2021 masing-masing sebesar Rp368.476.752 dan Rp467.624.856. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Terjadi penurunan terkait beban perjalanan dinas di TA 2022 dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang menghambat pelaksanaan perjalanan dinas.

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp155.655.998

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2022 dan TA 2021 masing-masing sebesar Rp155.655.998 dan Rp179.902.491. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang

bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Surplus /Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp3.476.000

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Terdiri dari beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp14.523.605 dan surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp0 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Non Operasional pada TA 2022 sebesar Rp3.476.000.

Pos Luar Biasa Rp0

D.10 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa pada TA 2022 sebesar Rp0,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp298.067.237*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp298.067.237 dan Rp575.981.112

*Surplus LO
Rp16.993.721.454*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp16.993.721.454 dan Rp17.738.345.337. Surplus LO merupakan selisih lebih antara surplus/ defisit kegiatan operasional, surplus/ defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan Rp0*

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

*Penyesuaian Nilai
Aset
Rp0*

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0*

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp0*

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Koreksi Lain-Lain
Rp0*

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

*Transaksi Antar
Entitas
(Rp17.015.975.974)*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp17.015.975.974) dan (Rp18.010.530.362).

*Ekuitas Akhir
Rp275.812.717*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp275.812.717 dan Rp298.067.237.

LAMPIRAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA II 604442

Tgl Data : 08/05/23 12:00 PM
Tgl Cetak : 08/05/23 2:15 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_komparatif

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	20,144,908,000	18,875,243,248	(1,269,664,752)	94	14,095,327,000	19,901,579,192	(5,806,252,192)	141
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	20,144,908,000	18,875,243,248	(1,269,664,752)	94	14,095,327,000	19,901,579,192	(5,806,252,192)	141
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BARANG	1,880,284,000	1,692,295,649	187,988,351	90	1,895,236,000	1,844,502,330	50,733,670	97
	BELANJA MODAL	0	0	0	0	46,548,000	46,546,500	1,500	100
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA II 604442

Tgl Data : 08/05/23 12:00 PM
Tgl Cetak : 08/05/23 2:15 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_komparatif

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	1,880,284,000	1,692,295,649	187,988,351	90	1,941,784,000	1,891,048,830	50,735,170	90
C	PEMBIAYAAN				0				0

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

DKI JAKARTA, 8 Mei 2023
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ALI AZCHAM NOVEANSYAH
196511061991031001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

**SATUAN KERJA : (604442) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JAKARTA II**

Tgl Data : 08/05/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 08/05/23 2:16 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Penerimaan	0	1,350,000	(1,350,000)	(100.00)
Kas Lainnya dan Setara Kas	1,089,137,105	6,497,354,986	(5,408,217,881)	(83.24)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	47,998,722	(47,998,722)	(100.00)
Persediaan	480,600	0	480,600	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	1,089,617,705	6,546,703,708	(5,457,086,003)	(83.36)
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	2,672,770,477	2,398,073,477	274,697,000	11.45
Aset Tetap Lainnya	3,263,752	3,263,752	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,400,463,571)	(2,136,281,198)	(264,182,373)	12.37
JUMLAH ASET TETAP	275,570,658	265,056,031	10,514,627	3.97
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	395,156,500	1,346,159,146	(951,002,646)	(70.65)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(395,156,500)	(1,331,635,541)	936,479,041	(70.33)
JUMLAH ASET LAINNYA	0	14,523,605	(14,523,605)	(100.00)
JUMLAH ASET	1,365,188,363	6,826,283,344	(5,461,094,981)	(80.00)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,089,375,646	6,497,354,986	(5,407,979,340)	(83.23)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	0	30,861,121	(30,861,121)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,089,375,646	6,528,216,107	(5,438,840,461)	(83.31)
JUMLAH KEWAJIBAN	1,089,375,646	6,528,216,107	(5,438,840,461)	(83.31)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	275,812,717	298,067,237	(22,254,520)	(7.47)
JUMLAH EKUITAS	275,812,717	298,067,237	(22,254,520)	(7.47)
JUMLAH EKUITAS	275,812,717	298,067,237	(22,254,520)	(7.47)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,365,188,363	6,826,283,344	(5,461,094,981)	(80.00)

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

DKI JAKARTA, 8 Mei 2023
 Penanggung Jawab UAKPA
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ALI AZCHAM NOVEANSYAH
 196511061991031001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

**SATUAN KERJA : (604442) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JAKARTA II**

Tgl Data : 08/05/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 08/05/23 2:15 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	18,838,755,647	19,761,782,336	(923,026,689)	(4.671)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	18,838,755,647	19,761,782,336	(923,026,689)	(4.671)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	18,838,755,647	19,761,782,336	(923,026,689)	(4.671)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	195,414,315	118,835,500	76,578,815	64.441
Beban Barang dan Jasa	952,416,523	1,078,311,674	(125,895,151)	(11.675)
Beban Pemeliharaan	176,547,000	179,730,300	(3,183,300)	(1.771)
Beban Perjalanan Dinas	368,476,752	467,624,856	(99,148,104)	(21.202)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

**SATUAN KERJA : (604442) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JAKARTA II**

Tgl Data : 08/05/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 08/05/23 2:15 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	155,655,998	179,902,491	(24,246,493)	(13.478)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	1,848,510,588	2,024,404,821	(175,894,233)	(8.689)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	16,990,245,059	17,737,377,515	(747,132,456)	(4.212)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	3,476,395	(982,178)	4,458,573	(453.948)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	18,000,000	0	18,000,000	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	14,523,605	982,178	13,541,427	1,378.714
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	1,950,000	(1,950,000)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	1,950,000	(1,950,000)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	3,476,395	967,822	2,508,573	259.198
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	16,993,721,454	17,738,345,337	(744,623,883)	(4.198)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	16,993,721,454	17,738,345,337	(744,623,883)	(4.198)

ALI AZCHAM NOVEANSYAH
196511061991031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (604442) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JAKARTA II

Tgl Data : 08/05/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 08/05/23 2:15 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	298,067,237	575,981,112	(277,913,875)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	16,993,721,454	17,738,345,337	(744,623,883)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	(5,728,850)	5,728,850	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	(5,728,850)	5,728,850	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(17,015,975,974)	(18,010,530,362)	994,554,388	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(22,254,520)	(277,913,875)	255,659,355	-
EKUITAS AKHIR	275,812,717	298,067,237	(22,254,520)	-

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

DKI JAKARTA, 8 Mei 2023

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ALI AZCHAM NOVEANSYAH

196511061991031001